



DISEMINASI TATA KELOLA ADMINISTRASI DIGITAL DI WILAYAH PEMERINTAHAN DESA ABUSAKIM BENGKULU TENGAH DALAM MENUNJANG DESA CERDAS

Marsidi¹⁾; Askani²⁾; Erlian Dwisnu³⁾ Rudi Hartono⁴⁾ Novi Rahayu⁵⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Bengkulu, Indonesia

Email: ¹⁾ dwisnuerlian@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Mei 2023]

Revised [29 Juni 2023]

Accepted [29 Juli 2023]

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Kegiatan Amal Kasih (PKM) ini berlangsung di Desa Abusakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Wilayah Administratif Pusat Bengkulu. Metode yang digunakan adalah Participatory Learning and Practice Process (PLA). Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Kami mendukung pembangunan pengelolaan desa dengan menggunakan teknologi perangkat desa. 2) Memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai database dan informasi terdepan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa di Abusakim. Hasil dari kegiatan bakti sosial tersebut adalah: 1) Perangkat desa Abusakim memahami penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. 2) Aparat desa Abusakim sudah mengetahui cara menangani dan menjalankan pemerintahan desa secara digital, dan sudah menuju smart village.

Kata Kunci: Desa Cerdas, Tata Kelola Administrasi

ABSTRACT

This charity event (PKM) was held in Abu Sakim Village, Pondok Klapa District, Bengkulu Central Governorate. The method used is Participatory Learning and Practice Process (PLA). The purposes of this non-commercial service implementation are to: 1) Support the development of village management utilizing village technology. 2) As the main database and information for managing village government and village development in Abu Sakim, provide village officials with an understanding of proper and correct village government management. The results of these PKM are: 1) Abu Sakim village officials understand the appropriate leadership management of the village as per the guidelines of the Minister of Home Affairs Decree No. 47/2016. 2) Abu Sakim village officials already know how to digitally process and operate village administration, paving the way for smart villages.

Keywords: Administrative, Governance, Smart Village

I. PENDAHULUAN

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam tujuan Sustainable Development Goals mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran (Nawacita ke-3), dengan memperkuat daerah dan desa. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa tersebut memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (Smart Village). Hanya saja, implementasi konsep desa cerdas di Indonesia saat ini masih



beragam, namun ada kecenderungan mengkaitkannya dengan pemanfaatan teknologi informasi di desa. Selain itu, adanya konsep desa cerdas yang beragam menyebabkan arah dan fokusnya menjadi kurang terstandarkan, baik sebagai program maupun kebijakan. Oleh karena itu, agar konsepsi model desa cerdas dapat diimplementasikan dengan arah dan kebijakan yang jelas, agenda untuk mengembangkan model desa cerdas menjadi mendesak untuk dilakukan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan dan perluasan implementasinya. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa, penataan administrasi perlu dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggara kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja, dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya (Suherman, 2019).

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi pemerintah. Agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, aparat pemerintah harus memiliki kualitas yang memadai (Sondakh et al., 2014).

Pemerintahan Desa merupakan sub-sistem dari pemerintahan nasional yang menjadi pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan administrasi pemerintahan desa merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Semakin baiknya penataan administrasi desa, good governance desa atau tata kelola pemerintahan desa semakin baik (Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, 2019).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa (Tampongongoy, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82- 86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan (Taufiq, Otong Husni & Hermawandi, 2007). Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Abusakim, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. ama yang dihadapi perangkat desa Abusakim sekarang ini dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ialah belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah distandarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Abusakim mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar, serta belum memanfaatkan teknologi, ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa belum baik, hal ini terjadi karena sebagian besar perangkat desa hanya berpendidikan sampai SMA. Hal ini semakin memburuk karena perangkat desa ini tidak memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi Perangkat Digital.



Melihat situasi permasalahan tersebut di atas maka PRODI Administrasi Negara melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Abusakim. Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa PRODI Administrasi Negara. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebagai perwujudan tanggung jawab dosen untuk melaksanakan tanggungjawab dalam hal tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian yang dipelajari untuk diterapkan kepada masyarakat. Kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan sekaligus melengkapi keterampilan dosen dan mahasiswa.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Abusakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan ialah:

1. Untuk memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa menggunakan teknologi (Perangkat Digital) kepada aparat desa
2. Untuk memberikan pemahaman kepada para aparat desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Abusakim.

Ada dua output yang menjadi target dalam PKM ini. Pertama, perangkat Desa Abusakim mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa menggunakan teknologi Perangkat Digital. Kedua, perangkat desa memiliki kemampuan untuk tertib administrasi.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Learning And Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (Diseminasi, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi penguatan kegiatan tertip administrasi desa (Asmanang La Ode et al, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur perangkat Desa Abusakim Kecamatan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pelaksanaan PKM dilaksanakan di Desa Abusakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 22 Mei 2023.

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik. Tim PKM dalam kegiatan ini dalam rangka memecahkan masalah tersebut ialah dengan melakukan Diseminasi Tata Kelola Administrasi Kantor Desa, dengan cara; Memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan PKM

| No | Tahapan Kegiatan | Metode yang Digunakan | Keterangan |
|----|---|--|---|
| 1 | Survey dan Penetapan Wilayah Mitra | Pertemuan dan diskusi | Tim PKM, kepala desa, dan aparatur perangkat desa |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar. | Ceramah konsep sistem administrasi desa. | Tim PKM, kepala desa, dan aparatur perangkat desa |

| | | |
|---|--|---------------|
| Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Materi Tentang Penggunaan Teknologi dalam membantu Administrasi Desa | Ceramah konsep sistem administrasi desa. | Duta Digital. |
|---|--|---------------|

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan administrasi pada pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa itu sendiri. Dengan terbentuknya administrasi desa yang baik, akan terbentuk tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam kegiatan mengenai administrasi desa diikuti oleh seluruh aparatur Desa Abusakim, pada saat penyampaian materi para peserta ternyata baru mengetahui ada panduan pengelolaan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Para peserta mengakui bahwa selama ini, mereka tidak membuat administrasi sesuai dengan aturan.

Desa Abusakim, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa di Desa Abusakim. Penjelasan tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan TIM PKM dibagi menjadi tiga tahapan. Beberapa tahapan tersebut akan dijelaskan pada bagian poin selanjutnya.

1. Survey

Hasil Survey yang dilakukan oleh Tim PKM bahwasanya aparatur desa dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah di standarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, aparatur desa Abusakim juga belum memahami cara mengisi administrasi menggunakan Perangkat Digital. Masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di desa Abusakim mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar dan cara menggunakan Perangkat Digital.



Gambar 1. Survey



Setelah itu dalam kegiatan pengabdian ini, Tim PKM melakukan Diseminasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan di Kantor Desa Abusakim dandihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh dosen STIA dan Duta Digital



Gambar 3. Peserta Desiminasi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian tentang pembinaan administrasi desa di Abu Sakim, mulai dari awal pelaksanaan yakni survei penetapan desa mitra, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sampai pada pembuatan dan pengisian administrasi desa menggunakan komputer, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian administrasi desa menggunakan komputer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Abu Sakim Bengkulu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, M. (2019). Penataan administrasi pemerintahan desa di desa kuala nenas kecamatan tambang kabupaten kampar. *DINAMISIA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 76–84.
- Asmanang La Ode, Herman. Tawakal, Faris, Indra, Puadji Fahrul, Sa'ban, L.M. Azhar, H. (2020). Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *Integritas : Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87–94. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/integritas/article/view/518/442>
- Sondakh, S. S., 1, Kimbal, M., 2, Kairupan, J., & 3. (2014). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.
- Suherman, A. (2019). Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.50>
- Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- Taufiq, Otong Husni & Hermawandi, D. (2007). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E Government Menuju Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E government Menuju Desa Cerdas